Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi IV
Minggu ke-4 Juni
(19 s.d. 25 Juni 2023)
2023

Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

# PETERNAKAN SAPI PERLUKAH MENJADI PROYEK STRATEGIS NASIONAL?

**Sri Nurhayati Qodriyatun**
Analis Legislatif Ahli Madya
*sri.qodriyatun@dpr.go.id*

## Isu dan Permasalahan

Menjelang Idul Adha, pasokan sapi hidup masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Demikian juga dengan pasokan daging sapi, yang sejak dicanangkannya program swasembada daging pada tahun 1995 hingga saat ini belum pernah mencapai tujuannya. Permasalahannya terletak pada hulu peternakan sapi, menyangkut nilai ekonomi berternak sapi di peternak rakyat. Di tengah sulitnya mendapatkan pasokan daging di dalam negeri, impor daging dan sapi sering menjadi pilihan. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan mengungkapkan, ketergantungan Indonesia terhadap daging sapi impor masih di atas 40%. Jika melihat tren populasi sapi dan jumlah sapi yang dipotong di RPH/TPH sebagaimana terlihat pada Gambar 1, maka peningkatan jumlah populasi sapi yang dibutuhkan untuk menekan ketergantungan impor menjadi 10% baru bisa dilakukan pada tahun 2026.

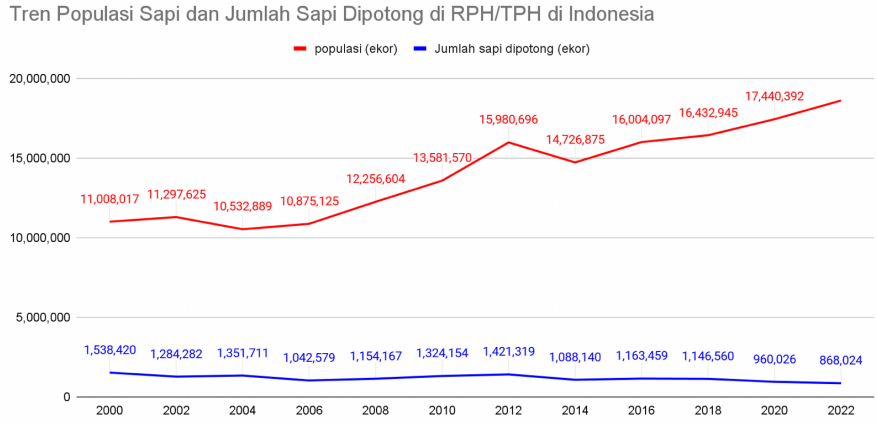


Sumber: BPS, diolah

Gambar 1. Tren Populasi Sapi dan Jumlah Sapi yang Dipotong di RPH/TPH di Indonesia (ekor) Tahun 2000–2022

Upaya meningkatkan populasi sapi sudah dilakukan pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab). Namun, program Upsus Siwab tidak berlanjut dan diganti diganti dengan program Sikomandan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan). Akan tetapi, program Sikomandan juga tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Industri peternakan sapi di dalam negeri dihadapkan pada banyak permasalahan, antara lain, keterbatasan lahan, kualitas bibit sapi yang belum optimal, ketersediaan pakan yang terbatas dan harga yang tinggi, kesehatan ternak, kurangnya pemahaman dan keahlian peternak dalam manajemen peternakan (pemeliharaan, nutrisi, reproduksi, dan manajemen keuangan), rendahnya penggunaan teknologi dan inovasi dalam peternakan, dan keterbatasan modal dari peternak rakyat. Di sisi lain, pemerintah terus menargetkan swasembada daging untuk

memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri. Bahkan, pemerintah juga menargetkan Indonesia mampu mengekspor daging sapi ke luar negeri dan menjadi lumbung pangan Asia pada tahun 2045. Alih-alih terus meningkat produksi daging sapi lokal, proporsi produksi daging lokal sebagai syarat swasembada daging justru kian menyusut (Gambar 1). Melihat kondisi ini tentunya perlu ada upaya lebih untuk mencapai target-target yang ditetapkan.

Memasukkan pengembangan peternakan sapi dalam proyek strategis nasional sepertinya memang diperlukan. Melalui proyek strategis nasional, berbagai *stakeholders* terkait dapat dilibatkan. Jika peternakan sapi akan dimasukkan dalam proyek strategis nasional, maka yang perlu dipersiapkan, antara lain, yaitu: (1) perencanaan yang matang dan studi kelayakan yang komprehensif untuk menentukan tujuan, target, dan skala proyek peternakan sapi yang akan dilaksanakan; (2) pemetaan lahan yang akan digunakan dan memperhatikan kebutuhan infrastruktur yang diperlukan (akses jalan, air bersih, listrik, dan sistem irigasi yang memadai); (3) persiapan pembiayaan yang matang, baik melalui sumber internal maupun kerja sama dengan sektor swasta atau lembaga keuangan; (4) pemanfaatan teknologi untuk pengembangan bibit sapi unggul; (5) peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pelatihan bagi peternak lokal; (6) sistem pengawasan yang ketat mulai dari produksi, kesehatan ternak, pengelolaan keuangan, hingga dampak lingkungan yang dihasilkan; (7) pembentukan jaringan distribusi yang efisien dan strategi pemasaran yang tepat.

## Atensi DPR

Pengembangan peternakan sapi menjadi satu hal yang perlu mendapatkan perhatian DPR RI, mengingat masih tingginya impor daging yang dilakukan pemerintah selama ini. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memasukkan peternakan sapi dalam proyek strategis nasional. Dengan masuknya pengembangan peternakan sapi dalam proyek strategis nasional, berbagai kementerian terkait, pemerintah daerah, juga swasta, dapat dilibatkan untuk menjalankan proyek. Kemudian, melalui pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI juga perlu memastikan adanya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pelaksanaan proyek itu nantinya. Harapannya, melalui proyek ini tidak hanya tercapai swasembada daging, tetapi peternak rakyat lebih sejahtera dan usahanya berkembang.

## Sumber

*Bisnis Indonesia,* 22 & 23 Juni 2023;
*Kompas,* 19 & 22 Juni 2023;
kompas.id, 19, 20, & 22 Juni 2023.

.

IsuSepekan
**Koordinator** Sali Susiana
**Polhukam** Puteri Hikmawati
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.
**Kesra** Hartini Retnaningsih

EDITOR
**Polhukam** Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
**Ekkuinbang** Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Rafika Sari, Eka Budiyanti, Dewi Wuryandani
**Kesra** Yulia Indahri, Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S., Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake, Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

https://puslit.dpr.go.id
@anlegbkdofficial
©PuslitBK2023